

# AWASI PENYALURAN BBM DAN LPG BERSUBSIDI, OMBUDSMAN SIDAK SPBU DAN PANGKALAN DI PALU

Rabu, 27 Maret 2024 - Siti Fatimah

PALU - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika didampingi Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, M Iqbal Andi Magga dan Vice President Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga, Pramono Wibowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa SPBU dan pangkalan LPG di Kota Palu dalam rangka pengawasan penyaluran BBM dan LPG Bersubsidi, Rabu (27/3/2024).

Giat ini untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM Bersubsidi seperti solar dan pertalite, ketepatan sasaran penyaluran, evaluasi dan efektivitas penggunaan aplikasi MyPertamina dan melakukan uji tera guna memastikan kuantitas dan kualitas BBM bersubsidi. Serta Ketersediaan Pasokan LPG Bersubsidi hingga evaluasi dan progres pendataan melalui Merchant Apps Pertamina (MAP).

Hasilnya, pada layanan BBM bersubsidi, Ombudsman melihat pelayanan yang diberikan oleh Pertamina kepada konsumen di SPBU telah menerapkan digitalisasi aplikasi MyPertamina. Khusus untuk BBM Bio Solar transaksi penjualan sudah cukup efektif menggunakan barcode pada aplikasi MyPertamina, hal ini dilakukan agar tercapai subsidi tepat sasaran. "Namun, Ombudsman tetap mendorong pihak Pertamina untuk memperkuat pengawasan guna mencegah praktik penggunaan banyak barcode pada 1 kendaraan, hal itu perlu dilakukan agar mencegah adanya spekulasi yang berupaya melakukan penyimpangan maupun penimbunan BBM bersubsidi," ujar Yeka.

Selain itu, Ombudsman memperoleh informasi bahwa sebelum Januari 2024, kerap terjadi antrian panjang kendaraan yang akan membeli Bio Solar di berbagai SPBU di Kota Palu. Atas permasalahan tersebut, telah memperoleh penyelesaian dan solusi melalui kesepakatan para stakeholder terkait seperti Pemda dan Pertamina, dengan mengatur jenis kendaraan dan waktu pembelian pada setiap SPBU di Kota Palu.

"Ombudsman memberikan apresiasi atas upaya para pihak dalam bersinergi menyelesaikan masalah. Praktik baik ini perlu dicontoh dan diterapkan di berbagai kabupaten dan kota lainnya, sehingga berdampak positif untuk pelayanan yg lebih baik bagi masyarakat," kata Yeka. Dari sisi ketersediaan pasokan BBM, dinilai sudah mencukupi kebutuhan di Kota Palu. Termasuk, hasil uji Tera yang dilakukan oleh Ombudsman bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, menunjukkan bahwa kuantitas BBM Bersubsidi (Solar & Pertalite) telah sesuai takaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkan hasil pemantauan di Pangkalan LPG, Ombudsman memantau penerapan pembelian LPG bersubsidi dengan konsumen menunjukkan KTP yang kemudian dicatat melalui Merchant Apps Pertamina (MAP). Langkah ini bertujuan agar LPG bersubsidi dapat dirasakan oleh golongan pengguna yang berhak. Bagi masyarakat yg belum terdata dalam sistem MAP, tetap dapat membeli LPG 3kg setelah dilakukan pendataan terlebih dahulu dengan menunjukkan KTP.

Catatan dari Ombudsman atas hal ini, perlu ada instrumen khusus yang dapat memastikan masyarakat tersebut layak atau tidak dinyatakan sebagai masyarakat kurang mampu. Karena pada dasarnya LPG bersubsidi peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu. Kemudian, mengenai penerapan kebijakan pembelian LPG 3 KG menggunakan KTP yang terdata dalam MAP yang direncanakan akan diberlakukan pada bulan Juni 2024, Ombudsman berpendapat perlu dilakukan percepatan dalam pemutakhiran data P3KE sebagai basis data yang digunakan untuk penyaluran dan penjualan LPG 3kg. Serta perlu ada percepatan dan kepastian atas proses revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 jo Perpres Nomor 70 tahun 2021 yang akan menjadi payung hukum dalam penyaluran dan penjualan LPG 3kg. (awp)